

KANTOR KOMUNIKASI UNIVERSITAS INDONESIA

KLIPING

KLASIFIKASI : Universitas Indonesia - Narasumber
TEMA : Bantuan Korban Banjir Jangan Dipolitisasi
SURAT KABAR/MAJALAH : Monitor Depok

Hari **Rabu** Tanggal **23** Bulan **Januari** Tahun **2013** Halaman **9** Kolom **2-7**

RINGKASAN :

Menurut pakar komunikasi politik UI Ari Junaedi partai politik yang ingin menolong para korban banjir harus menyalurkan bantuannya tanpa menyisipkan pesan-pesan politik. Masyarakat sudah cukup dewasa dalam berpolitik sehingga hal tersebut tidak efektif dilakukan sebagai bentuk kampanye.

CATATAN :

--

8

Bantuan korban banjir jangan dipolitisasi

JAKARTA, MONDE

Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi berpendapat partai politik (parpol) yang ingin menolong para korban banjir harus menyalurkan bantuannya tanpa menyisipkan "pesan-pesan" politik.

"Akan lebih baik bagi parpol yang ingin menyalurkan bantuan untuk para korban banjir untuk tidak menyampaikannya dengan pesan politik

yang bersifat mendorong masyarakat untuk memilih partai tertentu," kata Ari Junaedi.

Hal tersebut, menurut dia, tidak efektif untuk dilakukan sebagai bentuk kampanye karena masyarakat sudah cukup dewasa dalam hal politik sehingga pemberian bantuan yang tidak "dibumbui" dengan pencitraan politik justru akan lebih diterima oleh masyarakat.

"Oleh karena itu, selamatkan bantuan diberikan

oleh parpol tidak dalam bentuk yang 'mengikat' atau iming-iming maka masyarakat pun akan menerima dengan sikap positif," ujarnya.

Namun, dia juga mengatakan, kampanye melalui bantuan banjir itu harus dilakukan dengan tepat, tidak hanya mendirikan posko banjir atas nama partai politik tetapi tidak ada materi-materi bantuan yang disalurkan.

"Hal seperti itu seringkali terjadi, contohnya

pada waktu kebakaran sering melanda Jakarta. Begitu kebakaran selesai, banyak parpol yang beradu cepat untuk mendirikan posko, namun tidak benar-benar ada bantuan yang diberikan dan hanya ada gambar dan umbul-umbul partai," katanya.

"Bentuk bantuan yang seperti itu justru hanya akan menjadi bumerang bagi partai itu sendiri," tambahnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Univer-

sitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menilai, partai politik yang memberikan bantuan atau mendirikan posko banjir sebenarnya mengambil keuntungan dengan niat yang tidak tulus.

Menurut dia, pendirian posko di tempat-tempat yang terkena musibah banjir adalah tindakan yang tidak terpuji dalam memberikan bantuan.

"Memakai bendera partai dan atribut partai untuk menyalurkan bantuan pada korban banjir ada-

lah tindakan yang tidak didasari ketulusan," katanya.

Dia berpendapat, cara kampanye seperti itu merupakan sikap yang tidak etis dari para politikus. "Ini merupakan sikap yang lebih memanfaatkan penderitaan orang lain daripada berniat untuk memberikan bantuan. Ketika dakjuran diperlihatkan dalam memberikan bantuan dengan menggunakan atribut partai," ujarnya. □